



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI

Oleh:

Rofiq Irkham Fuadi

140810101038

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Oleh :

Rofiq Irkham Fuadi

140810101038

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati Ananda dan segala Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Nur Wasis Qodariyah dan Ayahanda Sudirman dan Adik tecinta Alvin Faiz Adzikra yang senantiasa tulus memberikan doa dan dukungan dalam setiap perjalanan ananda saat menempuh pendidikan mulai TK hingga Perguruan Tinggi, memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga sehingga ananda semangat untuk terus meraih cita – cita serta seluruh pengorbanan yang tak tercurahkan serta tak dapat dinilai.
2. Guru – guruku tersayang mulai dari Taman Kanak – Kanak hingga Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ketulusan hati untuk membimbing, memberikan ilmu dan kesabaran yang tidak ternilai demi kebahagiaan dan kesuksesan ananda.
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

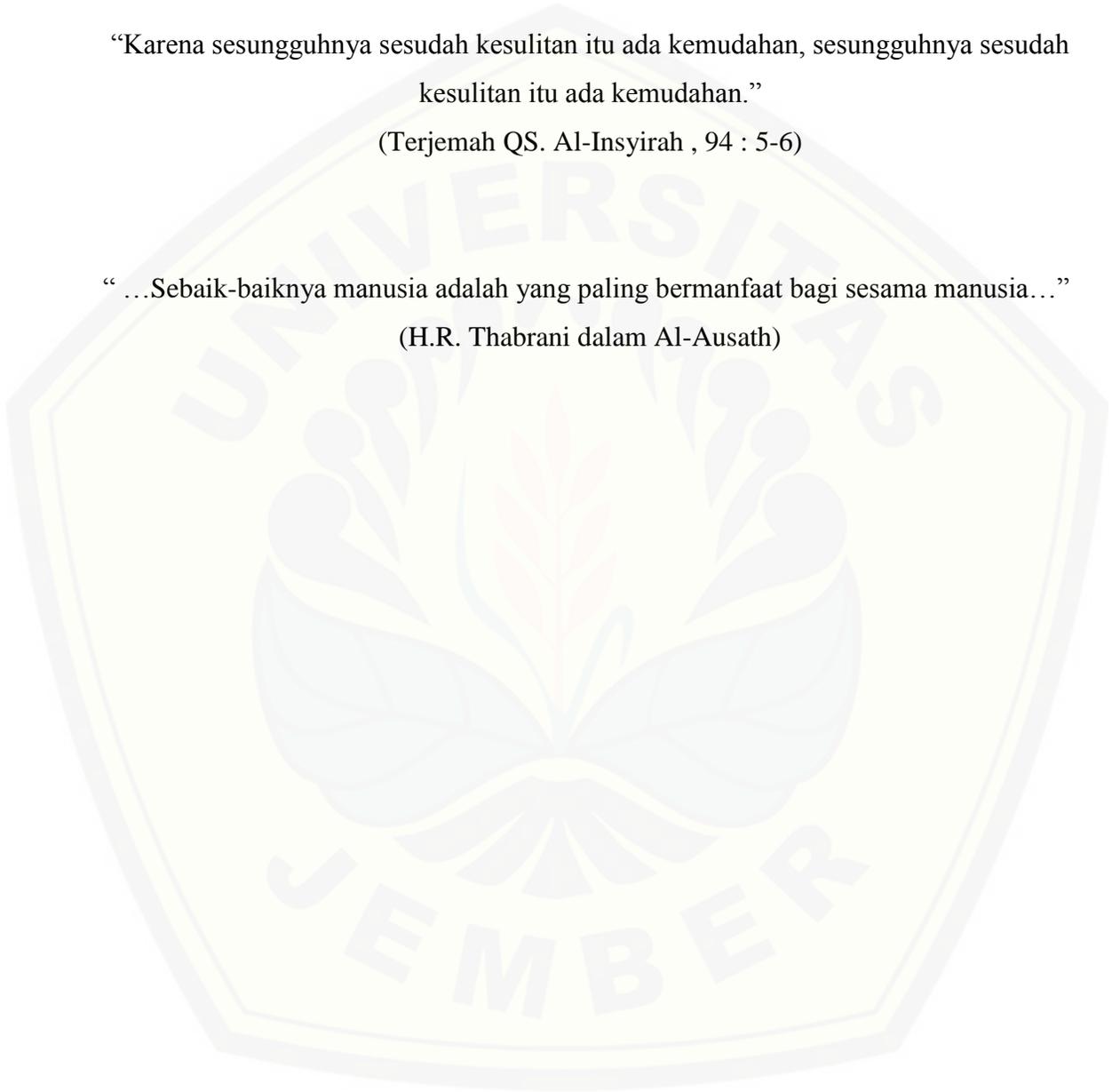
MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Terjemah QS. Al-Insyirah , 94 : 5-6)

“ ...Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia...”

(H.R. Thabrani dalam Al-Ausath)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rofiq Irkham Fuadi

NIM : 140810101038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2015” adalah benar – benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 September 2018

Yang menyatakan,

Rofiq Irkham Fuadi

NIM. 140810101038

SKRIPSI

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011-2015**

Oleh:

Rofiq Irkham Fuadi

140810101038

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks
Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap
Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2015

Nama Mahasiswa :Rofiq Irkham Fuadi

NIM :140810101038

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis

Jurusan :Ilmu Ekonomi

Konsentrasi :ESDM

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si.
NIP. 196004121987021001

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin.M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011-2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rofiq Irkham Fuadi

NIM : 140810101038

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

14 September 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. (.....)
NIP. 196306141990021001
2. Sekertatis : Dr. Teguh Hadi, M.Si (.....)
NIP. 197002061994031002
3. Anggota : Dr. Sebastiana Viphindrartin. M.Kes(.....)
NIP. 196411081989022001

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M.,Ak.

NIP. 197107271995121001

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2015

Rofiq Irkham Fuadi

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

ABSTRAK

Masalah pengangguran terbuka menjadi suatu hal yang terjadi di setiap Negara. Pengangguran terbuka dapat menjadi tolak ukur sebagai kemajuan sebuah Negara. Dari sisi ekonomi, pengangguran terbuka merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum terhadap pengangguran terbuka di 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta browsing internet dan website sebagai pendukung. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data regresi panel dengan metode FEM dengan bantuan perangkat lunak Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi pengangguran, variabel IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi pengangguran, Variabel Upah Minimum mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan.

Kata kunci: Pengangguran terbuka, PDRB, IPM, Upah

The Effect of Gross Regional Domestic Products, Human Development Index and Minimum Wages on Open Unemployment in Indonesia of 2011-2015

Rofiq Irkham Fuadi

*Departement of Economics and Development Studies
Faculty of Economics and Business, University of Jember*

ABSTRACT

The problem of open unemployment is something that happens in every country. Open unemployment can be a benchmark for the progress of a country. From an economic standpoint, open unemployment is a product of the inability of the labor market to absorb the available labor force. This study aims to examine the effect of variable Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI), and Minimum Wage on open unemployment in 33 provinces in Indonesia in 2011-2015. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) as well as browsing the internet and websites as supporters. While the method used in this study is the method of panel regression data analysis with the FEM method with the help of software Eviews 9. The results of this study indicate that the GDP variable has a negative influence and significantly affects unemployment, the HDI variable has a negative influence and significantly affects unemployment, Variable Wages The minimum has a positive and insignificant influence.

Keywords: Unemployment, GRDP, HDI, Wages

RINGKASAN

Masalah pengangguran terbuka menjadi suatu hal yang terjadi di setiap Negara. Pengangguran terbuka dapat menjadi tolak ukur sebagai kemajuan sebuah Negara. Dari sisi ekonomi, pengangguran terbuka merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Tingginya angka pengangguran terbuka tidak hanya menimbulkan masalah-masalah dibidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah dibidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial seperti kejahatan dan pencurian yang diakibatkan masalah ekonomi (Latumaerissa, 2015).

Studi ini meneliti tentang pengaruh PDRB, IPM, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di 33 Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan Pusat Statistika (BPS) serta *browsing website internet* sebagai pendukung. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan metode REM dengan bantuan software Eviews 9. Hasil penelitian ini adalah variabel PDRB memiliki koefisien sebesar $-2,14E-06$ dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Artinya apabila terjadi kenaikan terhadap PDRB sebesar satu milyar, maka akan terjadi kenaikan pada pengangguran terbuka sebesar $-2,14E-06$ persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Variabel IPM memiliki koefisien $-0,400312$ dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Artinya apabila terjadi peningkatan pada variabel IPM sebesar satu persen, maka akan terjadi penurunan pada pengangguran terbuka sebesar $-0,400312$ persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Variabel Upah minimum memiliki koefisien sebesar $5,97E-07$ dan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran. Artinya, apabila terjadi peningkatan pada variabel Upah Minimum sebesar satu persen maka tidak selalu terjadi penurunan pada pengangguran terbuka sebesar $5,97E-07$ persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah serta ridho-Nya dan tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW atas petunjuk yang telah diberikan kepada ummatnya mulai zaman jahiliyah hingga menuju jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2015”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Alasan-alasan penting yang menjadi pendorong untuk pembuatan skripsi ini adalah: sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah untuk mengurangi pengangguran terbuka di Indonesia, sebagai bahan bacaan atau referensi maupun penelitian lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang pengangguran terbuka di Indonesia.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik motivasi, nasehat, dorongan, kasih sayang, dan kritik membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak waktu luang dan kesediaan Beliau untuk membimbing, memberikan kritik dan arahan yang memotivasi bagi saya, saran yang memberikan manfaat, kesabaran, keikhlasan, yang tidak dapat dinilai dengan apapun dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak yang telah menjadi sosok guru dan bapak bagi kehidupan saya.
2. Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan banyak waktu luang dan kesediaan Beliau untuk membimbing, memberikan kritik dan arahan yang memotivasi bagi saya.

Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah menjadi sosok guru dan Bapak bagi kehidupan saya.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Ibunda Nur Wasis Qodariyah dan Ayahanda Sudirman dan Adik tecinta Alvin Faiz Adzikra yang senantiasa tulus memberikan doa dan dukungan dalam setiap perjalanan ananda saat menempuh pendidikan mulai TK hingga Perguruan Tinggi, memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga sehingga ananda semangat untuk terus meraih cita – cita serta seluruh pengorbanan yang tak tercurahkan serta tak dapat dinilai.
7. Untuk sahabatku Aninda Diah Hayu Pinasti Putri terimakasih untuk semangat, kenangan, kritik, dan saran yang telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi penulis.
8. Untuk sahabatku sekaligus teman kosan Tomi, Agus, Beki, Rofiqi, Rusdi terimakasih untuk canda tawa, kenangan dan rasa kekeluargaan yang hadir.
9. Teman – teman seperjuangan Ardan, Ajih, Juni, Rizal, Yasin, Try, Henry, Eko, Ilyas dan seluruh keluarga besar IESP 2014 terimakasih untuk semua rasa kekeluargaan yang hadir, cerita dan kenangan bersama.
10. Teman – Teman BANGKAFAMS Sholikhah, Tutik, Mbak Ina, Wendy, Dimas, Yusuf, Vrizky dan Dani terimakasih untuk semua rasa kekeluargaan yang hadir, cerita dan kenangan bersama.
11. Teman – teman KKN 32 Bahrin, Hakim, Aji, Rendra, Wahyu, Mas Nizar, Vivi, Visi dan Maulidya terimakasih atas seluruh kenangan selama tinggal 45 hari di Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 2 September 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.2 PDRB	17
2.3 IPM.....	18
2.4 Upah Minimum	22
2.5 Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka.....	24

2.6 Pengaruh IPM Terhadap Pengangguran Terbuka	25
2.7 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka.....	26
2.8 Penelitian Terdahulu	28
2.9 Kerangka Konseptual	33
2.10 Hipotesis.....	35
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	36
3.2 Variabel Penelitian	37
3.3 Metode Pengumpulan Data	37
3.4 Metode Analisis	38
3.4.1 Metode Analisis Data Panel	38
3.4.2 Uji Chow	39
3.4.3 Uji Hausman	40
3.4.4 Estimasi Model	40
3.5 Pengujian Kriteria Karakteristik	42
3.5.1 Uji Serentak (Uji F).....	42
3.5.2 Uji Individual (Uji t)	43
3.5.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	44
3.6 Uji Asumsi Klasik	44
3.6.1 Uji Normalitas	44
3.6.2 Uji Multikolinearitas	44
3.6.3 Uji Heterokedastisitas	45
3.7 Definisi Operasional.....	45
BAB 4. HASIL DAN ANALISIS.....	48
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	48
4.2 Analisis Data	49
4.2.1 Pengangguran Terbuka.....	49
4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto	52

4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	54
4.2.4 Upah Minimum	56
4.3 Hasil Penelitian	58
4.3.1 Hasil Uji Chow.....	58
4.3.2 Hasil Uji Hausman	58
4.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel	59
4.5 Pengujian Kriteria Statistik	60
4.5.1 Uji Serentak (Uji F).....	60
4.5.2 Uji Individual (Uji t)	61
4.5.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	61
4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik	62
4.6.1 Uji Normalitas.....	62
4.6.2 Uji Multikolinearitas	63
4.6.3 Uji Heterokedastisitas	64
4.7 Pembahasan.....	65
4.7.1 Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka.....	65
4.7.2 Pengaruh IPM Terhadap Pengangguran Terbuka	67
4.7.3 Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka.	68
BAB 5. PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2011-2015	2
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia Tahun 2011-2015.....	3
Tabel 1.3 Persentase Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2011-2015	4
Tabel 1.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Di Indonesia Tahun 2011-2015	6
Tabel 1.5 Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi di – Indonesia Tahun 2011-2015.....	7
Tabel 1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 Provinsi di Indonesia – Tahun 2011-2015	10
Tabel 1.7 Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 2011-2015	11
Tabel 4.1 Persentase Pengangguran Terbuka di 33 Provinsi di Indonesia – Tahun 2011-2015	50
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto di 33 provinsi di Indonesia Tahun – 2011-2015	52
Tabel 4.3 Persentasi Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi di Indonesia – Tahun 2011-2015	54
Tabel 4.4 Jumlah Upah Minimum di 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	58
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> , Variabel PDRB, IPM, dan Upah Minimum Terhadap Variabel Pengangguran Terbuka.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	61
Tabel 4.10 Hasil Uji R ²	62

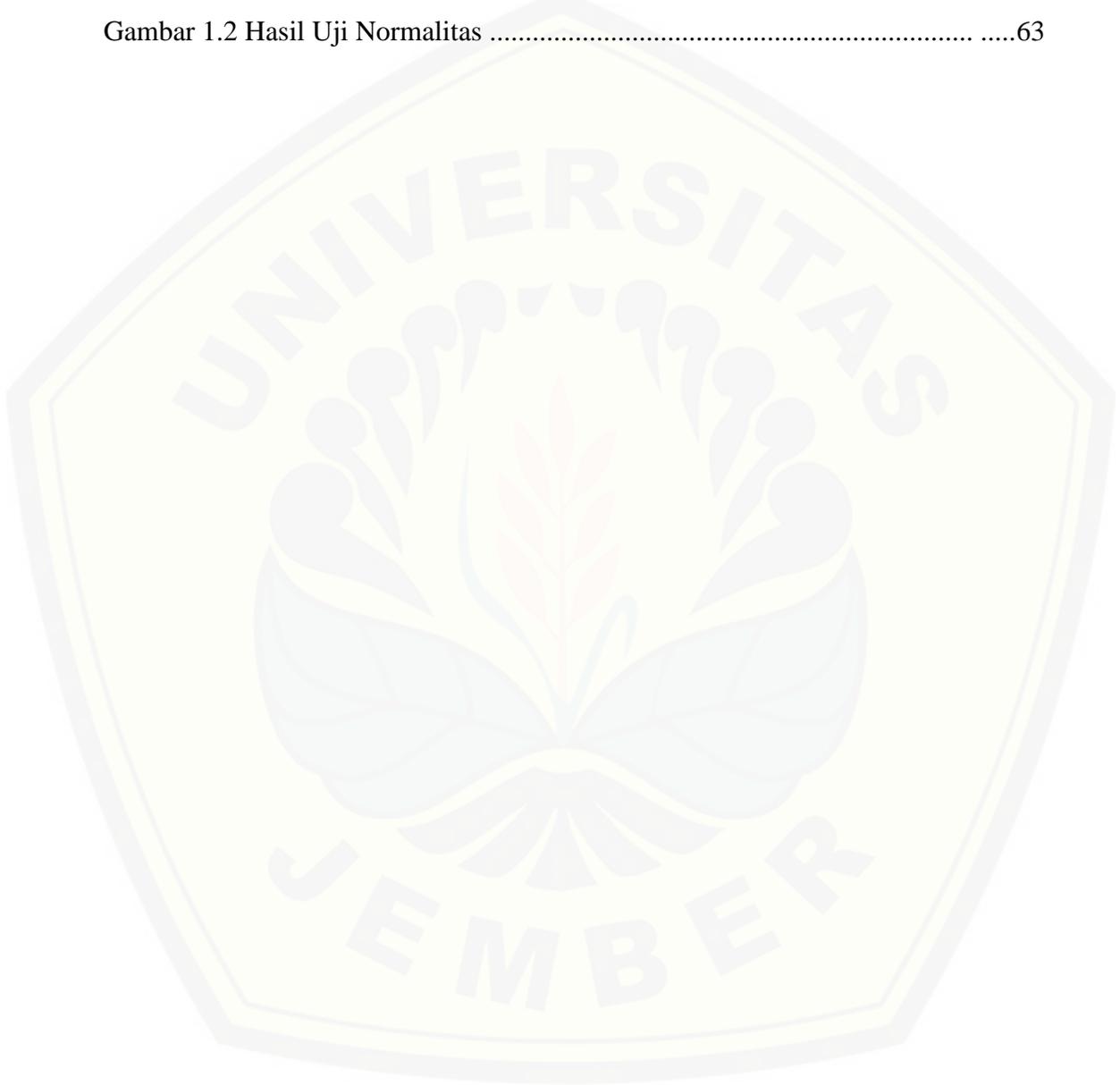
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas64

Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Batas-batas Wilayah Negara Indonesia.....48
Gambar 1.2 Hasil Uji Normalitas63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	76
Data Pengangguran, PDRB, IPM dan Upah Minimum di 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015.....	76
Lampiran B	81
Hasil Uji Chow.....	81
Hasil Uji Hausman	82
Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> , Variabel PDRB, IPM dan Upah- Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka	83
Lampiran C	84
Hasil Uji Normalitas	84
Hasil Uji Multikolinearitas.....	85
Hasil Heterokedastisitas	86

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut Badan Informasi Geospasial (2014) dalam Statistik Indonesia (2016) Pulau yang terdaftar dan berkoordinat sejumlah 13.466 pulau. Dari pulau tersebut terbagi menjadi 34 provinsi yang menyebar disuruh wilayah negara Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah negara peringkat ke empat setelah negara Amerika Serikat dengan jumlah penduduk mencapai 255.461.700 jiwa dengan 3,43% penduduk dunia. Dengan jumlah penduduk tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 sebesar 255.461.700 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut terbagi menjadi Angkatan Kerja sebesar 125.340.000 jiwa kemudian untuk bekerja 117.835.000 jiwa. Kemudian pengangguran sebesar 7.505.000 jiwa.

Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia tahun 2015 sebesar 67.630.000 jiwa. Kemudian tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2015 sebesar 5.995.000 jiwa. Masalah pengangguran terbuka menjadi suatu hal yang terjadi disetiap Negara. Pengangguran terbuka dapat menjadi tolak ukur sebagai kemajuan sebuah Negara. Dari sisi ekonomi, pengangguran terbuka merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Tingginya angka pengangguran terbuka tidak hanya menimbulkan masalah-masalah dibidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah dibidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial seperti kejahatan dan pencurian yang diakibatkan masalah ekonomi (Latumaerissa, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) definisi pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Menurut Mankiw (2000) dalam Amarullah (2008) kekakuan upah merupakan penyebab terjadinya

pengangguran. Kekakuan upah berarti gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel, sehingga upah riil tertahan di atas tingkat kliring pasar atau tingkat ekulibrium sehingga terjadi pengangguran.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1	2011	6,5
2	2012	6,3
3	2013	6,3
4	2014	5,1
5	2015	4,8

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi di sebagian besar negara – negara berkembang pertumbuhan ekonomi saja tampaknya tidak cukup (Sanusi, 2004). Berdasarkan tabel 1.1 tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011 – 2015 bahwa selama lima tahun pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan secara terus menerus. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 6,3% dan mengalami penurunan drastis di tahun 2014 menjadi 5,1% dan menurun kembali pada tahun 2015 mencapai angka 4,8%. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan menandakan kinerja perekonomian masih kurang maksimal. Penurunan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak bagi ketimpangan pendapatan, pengangguran maupun kemiskinan.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia Tahun 2011-2015

Lapangan Pekerjaan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	993857,3	1039440,7	1083141,8	1128448,0	1171578,7
Pertambangan dan Penggalian	748956,3	771561,6	785016,3	789329,7	767327,2
Industri Pengolahan	1607452,0	1697787,2	1774097,3	1856310,6	1934533,2
Pengadaan Listrik dan Gas	76678,1	84393,0	88805,1	93755,9	94894,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6125,1	6329,8	6587,1	6788,0	7369
Konstruksi	683421,9	728226,4	772719,6	826615,6	879163,9
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1013199,6	1067911,5	1118207,0	1172362,6	1207751,1
Transportasi dan Pergudangan	265774,0	284662,6	308521,2	333190,9	348773,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214022,0	228232,6	243748,3	258161,0	268922,4
Informasi dan Komunikasi	281693,8	316278,7	349150,2	384129,9	421741,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	256443,0	280896,1	306432,2	321525,5	347308,6
Real Estate	213441,4	229254,2	244237,5	256440,2	266979,6
Jasa Perusahaan	108239,3	116293,3	125490,7	137795,3	148395,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	276336,8	282235,3	288963,3	296145,0	310054,2
Jasa Pendidikan	215029,1	232704,3	251784,6	267633,3	283020,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72592,1	78380,1	84518,4	91287,8	97463
Jasa Lainnya	109372,4	115675,4	123088,8	134070,1	144902,4

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2015

Berdasarkan data dari Laporan Perekonomian Indonesia Badan Pusat Statistika pada Tabel 1.2 mengenai pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan melalui 17 sektor di Indonesia tahun 2011-2015. Dapat dilihat pada sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 789329,7 menjadi 767327,2.

Tabel 1.3 Persentase Pengangguran Terbuka di Indonesia pada Tahun 2011-2015

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
1	2011	7,22
2	2012	6,25
3	2013	6,02
4	2014	5,82
5	2015	5,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2017

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2011-2015 mengenai persentase jumlah pengangguran terbuka di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Sesekali mengalami kenaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tercatat sebesar 7,22 persen. Pada tahun 2012 angka pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan pada angka 6,25 persen, satu tahun kemudian yakni di tahun 2013 kembali mengalami penurunan pada angka 6,02 dan ditahun berikutnya yakni 2014 persentase pengangguran terbuka di Indonesia turun menjadi 5,82 persen. Pada tahun 2015 presentase pengangguran terbuka di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 5,99 persen. Persentase tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang cukup konsisten hanya saja dari tahun 2014 ke tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan. Hal tersebut merupakan dampak dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang terus membuat kebijakan untuk menanggulangi masalah pengangguran terbuka. Untuk menjaga konsistensi penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut pemerintah diperlukan untuk menangani masalah pengangguran terbuka tidak hanya dari segi menyediakan kesempatan kerja saja

melainkan juga diperlukan untuk mempersiapkan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Salah satu cara yang realistis dalam jangka pendek dari pemerintah untuk menanggulangi tingkat pengangguran terbuka yaitu dengan memberdayakan sektor informal, padat karya dan menciptakan jiwa kewirausahaan bagi kaum muda sehingga akan menciptakan pengusaha baru, disamping strategi jangka panjang seperti pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah melalui kebijakan desentralisasi. Dari kebijakan jangka pendek tersebut secara tidak langsung akan menyerap tenaga kerja yang ada disekitar lingkungan tersebut sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Sektor informal dinilai sangat membantu menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi pereda di tengah pasar global. Sektor industri pengolahan meskipun berfluktuatif tapi cenderung terus meningkat, begitu pula dengan perdagangan besar, eceran, hotel dan rumah makan merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian. Dengan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan mengindikasikan telah terjadi perubahan struktur lapangan kerja dari primer ke sekunder (Laporan Perekonomian Indonesia, 2011).

Tabel 1.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia Tahun 2011-2015

Lapangan Pekerjaan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian	36,39	35,19	34,78	34,00	32,88
Industri Pengolahan	1,33	1,42	1,26	1,25	1,15
Pengadaan Listrik dan Gas	13,81	14,35	13,79	13,63	13,53
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,18	0,17	0,18	0,18
Konstruksi	0,17	0,14	0,16	0,19	0,23
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,83	6,09	5,63	6,35	7,15
Transportasi dan Pergudangan	18,11	18,42	18,61	18,27	18,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,22	4,08	4,10	4,02	4,02
Informasi dan Komunikasi	3,36	3,36	3,76	4,20	4,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,48	0,48	0,50	0,47
Real Estate	1,15	1,24	1,33	1,32	1,45
Jasa Perusahaan	0,16	0,19	0,17	0,23	0,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,08	1,00	1,09	1,11	1,19
Jasa Pendidikan	3,57	3,19	3,24	3,20	3,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,42	4,49	4,48	4,74	4,88
Jasa Lainnya	1,08	1,10	1,14	1,16	1,27
	4,63	5,08	5,79	5,66	4,68

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia, 2015

Masalah pengangguran berkaitan dengan bidang pendidikan. Teori Human Capital bahwa seseorang dengan kualitas pendidikan lebih tinggi maka akan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja tersebut dan sebaliknya apabila kualitas pendidikan semakin rendah maka produktivitas tenaga kerja tersebut juga akan rendah hal itu akan sangat berpengaruh terhadap persaingan dalam memasuki dunia kerja.

Tabel 1.5 Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi di Indonesia Tahun 2011 – 2015 (Jiwa)

Tahun	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi (Jiwa)			
	SLTA Umum/SMU	SLTA Kejuruan/SMK	Akademi/Diploma	Universitas
2011	2,381,096	1,135,436	372,912	589,329
2012	1,955,726	1,042,737	229,206	499,521
2013	1,900,229	1,061,425	191,186	429,613
2014	1,928,147	1,089,943	194,387	446,720
2015	2,021,220	1,372,028	252,926	609,494

Sumber :Badan Pusat Statistik 2017

Pada Tabel 1.5 menjelaskan tentang jumlah Pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi di Indonesia pada tahun 2011-2015. Dapat dilihat bahwa pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu : SLTA Umum/SMU, SLTA Kejuruan/SMK, Akademi/Diploma, Universitas. Pada Tabel diatas dapat kita lihat bahwa tiap tahun jumlah pengangguran terbuka menurut 4 kategori tersebut mengalami penurunan dari tahun 2011-2013. Hal ini dikarenakan lapangan pekerjaan masih dapat menampung tenaga kerja dari beberapa kategori yaitu SLTA Umum/SMU, SLTA Kejuruan/SMK, Akademi/Diploma, dan Universitas. Pada tahun 2014 sampai 2015 pengangguran terbuka mengalami kenaikan yang cukup besar yakni pada tingkat SLTA Umum/SMU sebesar 2.021.220 jiwa, SLTA Kejuruan/SMK sebesar 1.372.028 jiwa, pada tingkat Akademi/Diploma

sebesar 252.926 jiwa dan tingkat Universitas sebesar 609.494 jiwa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dari pada permintaan tenaga kerja, sehingga akan berakibat kenaikan tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.

Penggunaan data dimulai dari tahun 2011 dikarenakan pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat sebesar 6,5% dibanding tahun sebelumnya pada satu dekade terakhir. Di sisi permintaan peningkatan tersebut terutama disumbang oleh meningkatnya kinerja konsumsi dan investasi (PMTB), sementara di sisi penawaran oleh meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pertumbuhan yang meningkat tersebut diikuti oleh membaiknya kualitas pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya peran investasi dan tetap tingginya peran ekspor, turunnya pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya peran pertumbuhan ekonomi dari luar Jawa.

Indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan peningkatan dari GDP. GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga Negara dan orang asing) dalam suatu Negara (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di Negara tersebut karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu Negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu Negara (Mankiw, 2000:67). Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persendikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi/rendahnya tingkat pengangguran suatu negara dapat dikaitkan dengan pertumbuhan GDP dalam negara

tersebut. Sementara untuk suatu wilayah, GDP tersebut dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Peningkatan output tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap pengangguran yaitu indikator IPM. Dalam perkembangannya peningkatan IPM menjadi indikator utama sebagai hasil akhir tujuan pembangunan daerah dalam kerangka perwujudan otonomi daerah. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, sehingga pendidikan faktor yang penting dalam menentukan masa depan masyarakat. Selanjutnya adalah kesehatan dimana pada bidang kesehatan ini pencapaian yang diperoleh adalah menurunnya gizi buruk pada balita, meningkatkan kecamatan bebas rawan gizi. Menurut (Atmanti, 2005) human capital sebagai seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka. Termasuk juga didalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu. Jadi human capital adalah nilai dan atau kualitas dari seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa potensial orang atau tenaga kerja tersebut bisa memproduksi dalam perekonomian. Jadi human capital ini berfungsi sebagai modal bagi seseorang atau tenaga kerja untuk mencari pekerjaan dimana kualitas manusia ini menjadi acuan dimana tenaga kerja yang mempunyai kualitas manusia yang tinggi lebih diunggulkan dalam mendapatkan pekerjaan dibanding dengan tenaga kerja yang mempunyai kualitas yang rendah. Sehingga perbedaan inilah yang membuat jumlah pengangguran dapat bertambah. Kualitas manusia dapat diproyeksikan dari Indeks Pembangunan Manusia karena di dalam IPM terdapat tiga indikator pembentuknya yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.

Tabel 1.6 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2011-2015

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (Persentase)
1	2011	67.09
2	2012	67.7
3	2013	68.31
4	2014	68.9
5	2015	69.55

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Pada Tabel 1.6 menunjukkan persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011-2015. Pada Tabel diatas persentase tiap tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini dapat diartikan bahwa tiap tahun kualitas manusia yang diproyeksikan dalam indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mengalami kenaikan. Kenaikan kualitas tersebut dapat menjadi sebuah modal bagi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan.

Indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap pengangguran yaitu upah. Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Menurut J.R. Hicks (dalam Kaufman dan Hotchkiss, 1999)

Teori penetapan upah dalam suatu pasar bebas sebenarnya merupakan kasus khusus dan teori nilai umum. Upah adalah harga tenaga kerja. Dalam perekonomian masalah pengangguran merupakan masalah ekonomi yang harus dihadapi dan diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan dimana dalam kebijakan upah minimum ini dapat menentukan jumlah pengangguran di setiap daerah. Interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah keseimbangan dan sebaliknya peningkatan penawaran akan menurunkan tingkat upah.

Tabel 1.7 Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 2011-2015

No	Tahun	Upah Minimum Regional (Rupiah)
1	2011	988829
2	2012	1088903
3	2013	1296908
4	2014	1584391
5	2015	1790342

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Tabel 1.7 menunjukkan besarnya upah minimum di Indonesia tahun 2011-2015. Upah minimum pada Tabel diatas setiap tahunnya mengalami kenaikan, dimana kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kenaikan upah yang terjadi pada perusahaan namun disisi lain biaya perusahaan yang meningkat akan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan antara biaya produksi dengan upah yang dikeluarkan perusahaan. Dalam kondisi ekonomi seperti ini apabila biaya upah lebih besar dari pada keuntungan maka perusahaan akan melakukan pengurangan jumlah pekerja atau PHK sehingga akan berdampak pada bertambahnya pengangguran yang terjadi akibat dari PHK tersebut.

Berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) maka tenaga kerja diberbagai negara akan semakin mudah untuk memasuki pasar tenaga kerja di negara lain. Hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia apabila kualitas pendidikan tidak segera di benahi. Melihat hal tersebut dikhawatirkan pasar tenaga

kerja Indonesia akan semakin banyak di masuki oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri tidak mampu bersaing. Penelitian ini membahas mengenai tingkat pengangguran terbuka dikarenakan permasalahan tersebut menjadi masalah yang selalu ada disetiap negara namun lebih cenderung dialami oleh negara berkembang dari pada negara maju. Penelitian ini menggunakan tahun periode selama lima tahun yaitu dari tahun 2011 – 2015 dan meneliti di 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini tidak mengambil semua provinsi dikarenakan kendala mengenai data yang tersedia karena salah satu provinsi yaitu Kalimantan Utara masih terbilang Provinsi baru dan mengenai kelengkapan data masih belum tersedia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh variabel PDRB, IPM dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel PDRB, IPM, Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka?
3. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang terkait dengan masalah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, maka peneliti bertujuan untuk:

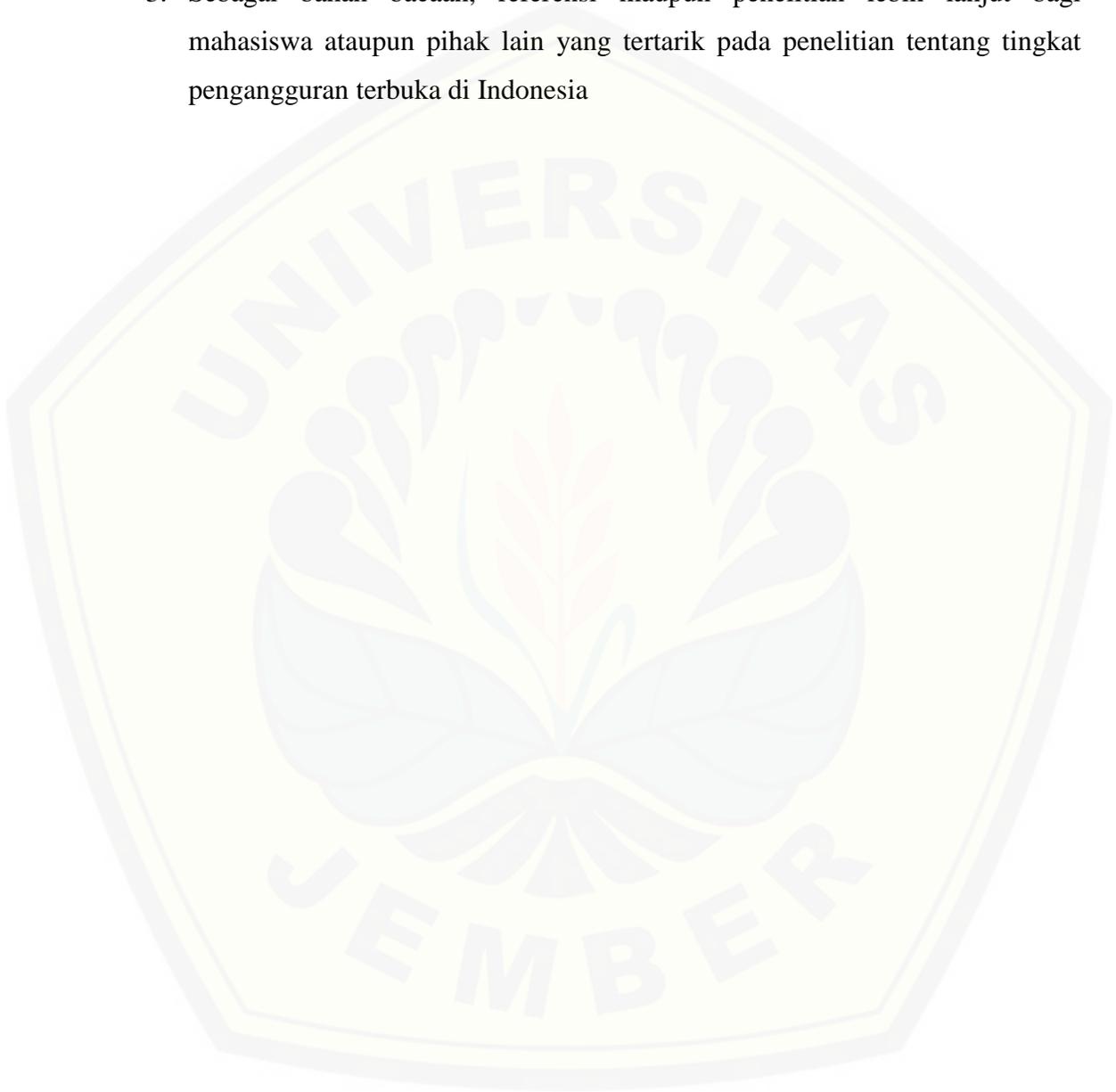
1. Untuk mengetahui secara bersama-sama bagaimana pengaruh terhadap Pengangguran Terbuka.
2. Untuk mengetahui secara parsial variabel apa yang berpengaruh terhadap Penganggura Terbuka.
3. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia

2. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia
3. Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Malthus

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan.

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Dalam teori Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak

diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

Menurut Sukirno, 1994 (dalam Qadrunnada, 2017) berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok:

- a. Pengangguran Friksional yaitu dimana pengangguran itu terjadi karena para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, namun mereka menganggur karena ingin mendapatkan kerja yang lebih baik lagi.
- b. Pengangguran Siklikal yaitu dimana pengangguran tersebut terjadi karena adanya penurunan permintaan agregat atau kemerosotan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap produksi sehingga mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja bahkan menutup perusahaannya sehingga para pekerja tersebut menjadi pengangguran.
- c. Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini juga dapat terjadi didalam perusahaan seperti biaya pengeluaran terhadap bahan baku produksi sehingga perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerja sehingga menyebabkan terjadinya Pengangguran Struktural.
- d. Pengangguran Teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan oleh pergantian tugas pada tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin.

Menurut Nanga, 2001 (dalam Budiani, 2009) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu:

- a. Tingkat upah ; dimana tingkat upah memegang peranan yang sangat besar dalam ketenagakerjaan. Tingkat upah yang berlaku akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja.
- b. Teknologi ; penggunaan teknologi yang tepat guna akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan jumlah pengangguran.

- c. Produktivitas ; peningkatan produktivitas tenaga kerja akan mengurangi permintaan tenaga kerja dan hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran.
- d. Fasilitas modal ; fasilitas modal mempengaruhi permintaan tenaga kerja melalui 2 sisi dimana sisi pengaruh substitusi bertambahnya modal akan mengurangi permintaan tenaga kerja, sedangkan sisi pengaruh komplementer bertambahnya modal akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk pengelolaan modal yang tersedia.
- e. Struktur perekonomian ; perubahan struktur ekonomi menyebabkan penurunan tenaga kerja, terutama tenaga kerja anak dan tenaga kerja tidak terdidik.

Menurut Sukirno, 1994 (dalam Hartanto dan Masjkuri, 2017) berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi kedalam empat kelompok :

- a. Pengangguran Terbuka yaitu pengangguran yang disebabkan oleh pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.
- b. Pengangguran Tersembunyi yaitu pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian atau jasa. Pengangguran ini seringkali didapati karena banyaknya jumlah pekerja dalam suatu kegiatan lebih banyak dari yang diperlukan supaya dalam mengerjakan kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien.
- c. Pengangguran Musiman yaitu pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian, dimana pengangguran ini terjadi saat mereka tidak melakukan pekerjaan. Dalam arti disaat waktu kemarau maka para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya sehingga mereka terpaksa menganggur selanjutnya apabila waktu musim panen mereka akan kembali bekerja sampai waktu kembali menanam.
- d. Setengah Menganggur yaitu dimana pengangguran tersebut terjadi dikarenakan para pekerja itu mempunyai jam kerja yang sedikit. Biasanya antara 1 hingga 2 hari dalam satu minggu, 1 atau 4 jam dalam sehari. Pekerja

yang mempunyai masa kerja seperti itu disebut sebagai setengah menganggur (underemployed).

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan Modern, dimana Teori Harrod-Domar ini merupakan perkembangan dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi teori makro jangka panjang. Menurut Keynes dan Harrod-Domar pengeluaran investasi (I) tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat (AD) tetapi juga terhadap penawaran agregat (AS) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang ini investasi menambah stok capital (K). Harrod-Domar (dalam Ma'ruf dan Wihastuti 2008) mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Output yang dimaksud adalah output potensial yang bisa dihasilkan dengan stok kapital yang ada. Sedangkan output yang terealisasi belum tentu sama dengan output potensial, hal ini tergantung pada jumlah permintaan agregat. Terdapat 3 pendekatan untuk menghitung PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Sembilan lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan (9) jasa – jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba.
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d. Perubahan inventori.
- e. Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor)

Cara penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk, yaitu :

1. PDRB atas dasar harga konstan

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2. PDRB atas dasar harga berlaku

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga berlaku pada tahun tersebut. Dari penghitungan ini akan diketahui bagaimana perkembangan struktur ekonomi.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya

membangunan kualitas hidup manusia dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Investasi modal manusia (Human Capital Investment) berkaitan dengan pembentukan modal manusia, yaitu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman, yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara (Jhingan, 1975 dalam Nur Kodar, 2014). Human Capital Investment adalah pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh seseorang maka akan meningkatkan produktifitas kerja orang tersebut juga. Hal ini berarti sejalan dengan teori Human Capital Investment, bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam peningkatan produktifitas angkatan kerja yang bekerja. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas Human Capital Investment, antara lain : IPM, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dll.

Peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia pada dasarnya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan rate of return (manfaat) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisis biaya manfaat terlebih dahulu (Pambudi, 2013). Dalam pengertian luas investasi pada modal manusia berarti pengeluaran di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial pada umumnya dan dalam arti sempit berarti pengeluaran di bidang pendidikan dan latihan. Modal manusia atau tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan suatu indeks yang berdasarkan tiga

indikator, yaitu: angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Komponen-komponen IPM terdiri dari :

1. Indeks Harapan Hidup

Indeks ini merupakan jumlah tahun hidup yang diharapkan dinikmati penduduk suatu wilayah dengan cara memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun sehingga dapat mencerminkan rata-rata lama hidup masyarakat. Dalam hal ini data yang diperlukan adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita yang pernah kawin.

2. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan (IP) meliputi dua indikator yaitu angka melek huruf (*Adult Literacy Rate Index*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years Of Schooling Index*). Populasinya adalah yang berumur 15 tahun keatas, karena biasanya diusia tersebut ada yang sudah berhenti sekolah. Angka disini dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena penduduk berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

3. Standard Hidup Layak

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) pembangunan ditujukan untuk mengembangkan sumberdaya manusia, artinya proses yang ditujukan untuk mengembangkan pilihan yang bisa dilakukan oleh manusia. Asumsinya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang

lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. (Todaro dan Smith, 2006), selain itu juga pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan.

Todaro dan Smith (2003) berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Melalui tingkat kemiskinan, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan produktifitasnya. Menurut Todaro dan Smith (2003) untuk mengukur tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat pada tingkat menengah kebawah indikator yang digunakan adalah kesehatan, gizi, pendidikan, serta pendapatan. Dalam mengkonversikan karakteristik komoditi menjadi fungsi yang sesuai dalam banyak hal yang penting membutuhkan kesehatan dan pendidikan serta pendapatan.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Menghitung IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup saat lahir

HLS : Rata – rata Lama Sekolah

RLS : Rata – rata Lama Sekolah

Pengelompokkan IPM kedalam beberapa kategori, yaitu:

IPM <60 : IPM rendah

60 < IPM <70 : IPM sedang

70 < IPM <80 : IPM tinggi

IPM <80 : IPM sangat tinggi

2.4 Upah Minimum

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi klasik tidak dibedakan antara pembayaran atas pekerja tetap dan professional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Kedua pembayaran tersebut, dalam teori ekonomi disebut upah (Sukirno,1985:298). Salah satu landasan mikro ekonomi kelompok post Keynesian yaitu teori upah efisien. Teori ini memberi landasan bahwa akan selalu ada pengangguran terpaksa dan adanya fixed effect yang menyebabkan ketegaran upah, karena baik industri yang berupah tinggi maupun yang berupah rendah ternyata tidak melakukan penyesuaian, tetapi cenderung mempertahankannya. Menurut teori ini perusahaan akan berprofesi lebih efisien jika upah di atas equilibrium. Teori upah efisiensi dikembangkan oleh Mankiw (2000:52) akan lebih menguntungkan bagi perusahaan apabila perusahaan memberlakukan sistem upah tinggi maka tenaga kerja tersebut akan mempunyai ketenangan berangkat

menuju tempat kerja dan di dalam bekerja akan memberikan pemikiran yang maksimum. Dengan demikian tenaga kerja tersebut akan memberikan upah (effort) yang maksimal sehingga produktifitas meningkat.

Menurut Gilarso, 2003 (dalam skripsi Sisputro, 2013) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu : upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang tersebut). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Tingkat upah disebut juga taraf balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun (Gilarso, 2003).

Menurut Gilarso, 2003 (dalam skripsi Sisputro, 2013) Sistem upah dibagi menjadi 4 yaitu :

a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan besarnya upah tersebut tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini diterapkan apabila hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dll.).

b. Upah Waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja dalam melakukan pekerjaan tersebut. Lama waktu pekerjaan ini dapat dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan.

c. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu

pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Seperti contoh upah yang diberikan kepada pekerja kuli bangunan.

d. Upah Bagi Hasil

Upah ini merupakan cara yang biasanya diterapkan dalam bidang pertanian dan dalam bidang usaha pada keluarga. Seperti contoh pada pertanian ada sistem upah bagi hasil ini dibagi oleh pemilik lahan dengan buruh yang bekerja pada lahan pertanian tersebut.

2.5 Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka

Pengangguran biasanya bergerak bersamaan dengan output pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran yang luar biasa ini, berbarengan dengan hubungan numerikal, pertama kali diperkenalkan oleh Okun yang kemudian dikenal menjadi Hukum Okun. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun ini dapat digunakan untuk menghubungkan perubahan angka pengangguran dengan pertumbuhan pada output. Sebuah konsekuensi penting dari Hukum Okun adalah GDP actual harus berkembang secepat GDP potensial untuk menjaga angka pengangguran tidak meningkat. GDP harus tetap berjalan hanya untuk menjaga angka pengangguran tetap ditempatnya. Selain itu jika ingin menurunkan angka pengangguran maka GDP actual harus berkembang lebih cepat dari pada GDP potensial. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi/rendahnya tingkat pengangguran suatu negara dapat dikaitkan dengan pertumbuhan GDP dalam negara tersebut. Sementara untuk suatu wilayah, GDP tersebut dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja yang menggambarkan asosiasi antara pergerakan

jangka pendek GDP nyata dan perubahan angka pengangguran (Sun'an *et al*:2015:365)

Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui PDRB yang dibentuk dalam berbagai wilayah di Indonesia. PDRB ini merupakan indikator dalam suatu wilayah di Indonesia yang secara otomatis berhubungan langsung dengan jumlah pengangguran. Pengaruh PDRB ini dapat bersifat positif maupun negatif terhadap pengangguran, pada sisi positif ini pertumbuhan ekonomi meningkat tidak diiringi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini berorientasi pada padat modal, dimana kegiatan produksi untuk memacu output yang menghasilkan pendapatan lebih utama dibanding pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

2.6 Pengaruh IPM Terhadap Pengangguran Terbuka

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita akan memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu provinsi atau daerah maka hal tersebut akan berdampak pada menurunnya pengangguran. Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana pembangunan manusia memainkan peran kunci dalam pembentukan kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas tenaga kerja agar mampu memiliki keahlian teknologi dan bersaing di pasar tenaga kerja guna untuk mengurangi pengangguran dan berdampak pada terciptanya pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.

Salah satu indikator dalam indeks pembangunan manusia adalah pendidikan, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Tujuan akhir program dari pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah teraihnya lapangan pekerjaan yang

tersedia. Menurut Becker (Atmanti,2005) human capital adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Menurut Davenport (Atmanti,2005) human capital sebagai seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka. Termasuk juga didalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu. Jadi human capital adalah nilai dan atau kualitas dari seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa potensial orang atau tenaga kerja tersebut bisa memproduksi dalam perekonomian terutama menghasilkan barang dan jasa.

2.7 Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terbuka

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha memperkerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Dengan kata lain upah yang dibayarkan oleh pengusaha adalah :

$$W = VMPP_L = MPP_L \times P$$

Dimana:

W = tingkat upah (dalam arti *labour cost*) yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja

P = harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang

MPP_L = *marginal physical product of labor* atau pertambahan hasil marjinal pekerja, diukur dalam unit barang per unit waktu

$VMPP_L$ = *value of marginal physical of labor* atau nilai pertambahan hasil marjinal pekerja atau karyawan.

Pengaruh upah minimum terhadap pengangguran ini dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (2000). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat

upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Hal ini berbeda dengan yang ada pada sisi pengusaha, apabila upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan dengan mengurangi tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini yang akan berakibat peningkatan pengangguran. Menurut Samuelson, 2004 (dalam Luther Aruan, Norman dan Sriyono, D, 2014), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli.

2.8 Penelitian Terdahulu

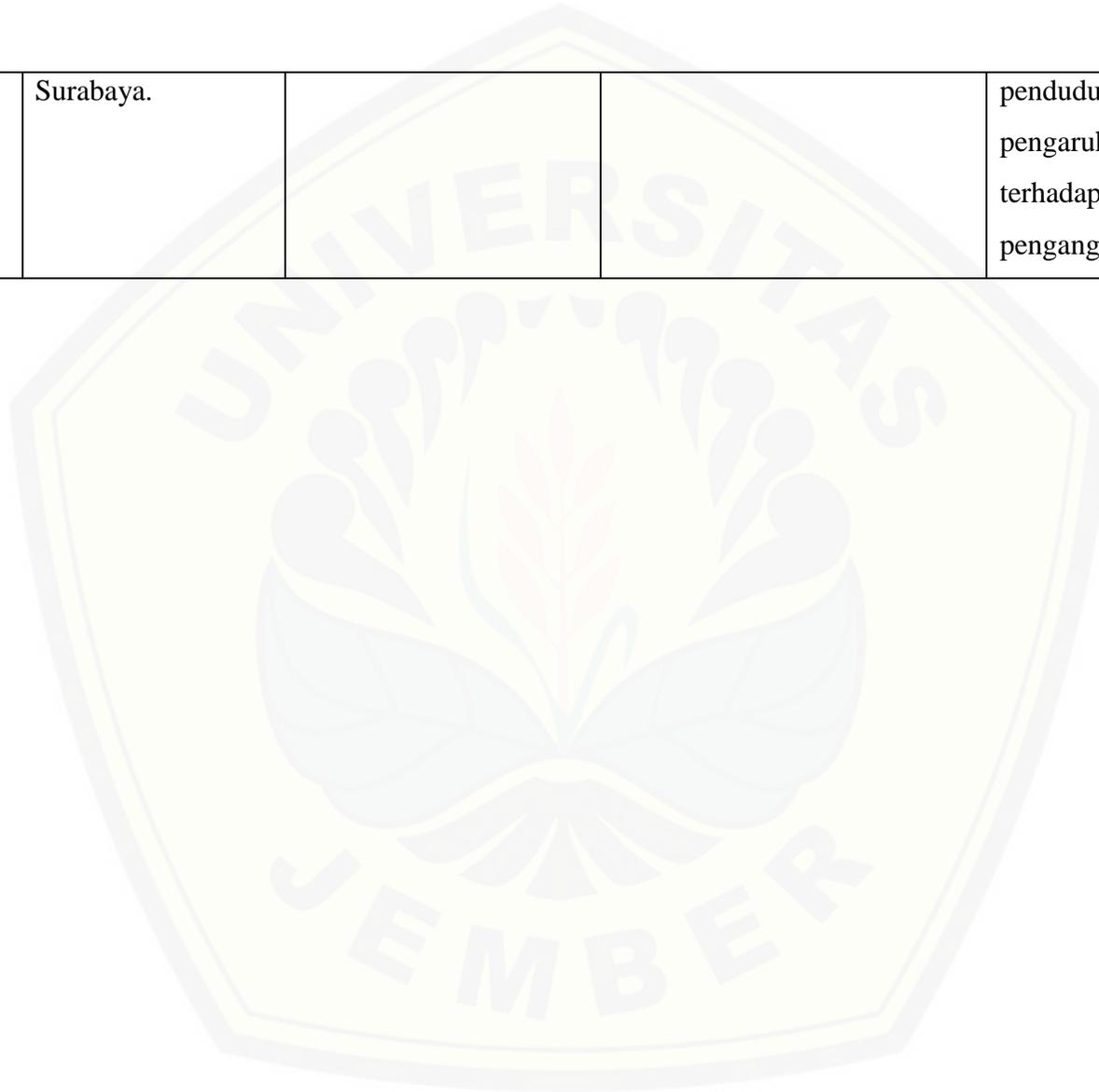
No	Nama	Judul	Variabel	Metode	Kesimpulan
1.	Anggun Kembar Sari (2013)	Analisis Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatra Barat.	Variabel Dependen: Pengangguran. Variabel Independen: Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah.	Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel, yaitu kombinasi antara data runtut waktu (time series) dengan beberapa tempat (crossing) bentuk data panelnya adalah Stacked data by Cross-section.	Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Sumatra Barat yaitu disaat tingkat pendidikan meningkat juga menyebabkan pengangguran terdidik mengalami peningkatan.
2.	Syahril (2016)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat.	Variabel Dependen: Pengangguran. Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja.	Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan model Regresi Linear Berganda. Uji yang digunakan menggunakan Analisis Korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan variable bebas terhadap	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi semakin rendah tingkat pengangguran. Meningkatkan investasi swasta dapat menurunkan tingkat

				variable terikat. Menggunakan Uji t untuk menguji hipotesis suatu parameter yang berukuran kecil ($n \leq 30$) dan ragam populasi tidak diketahui.	pengangguran melalui penyederhanaan mekanisme dan prosedur penanaman modal.
3.	Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti, Ni Luh Karmini (2014)	Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali.	Variabel Dependen: Pengangguran Variabel Independen: Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum.	Metode analisis yang dipakai adalah dengan metode asosiatif dan teknik analisis regresi data menggunakan metode Ordinary Least Square.	Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat yaitu pengangguran di Provinsi Bali. Secara parsial tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Bali. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

					pengangguran di Provinsi Bali.
4.	Novlin Sirait, A A I N Marhaeni (2013)	Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten / Kota di Provinsi Bali.	Variabel Dependen : Pengangguran Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Tingkat Pendidikan	Metode pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan. Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif, antara lain : Analisis Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik.	Berdasarkan uji t dengan taraf nyata 5 persen atau tingkat keyakinan 95 persen dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan, upah minimum kabupaten berpengaruh negative signifikan sedangkan tingkat pendidikan negative tidak nyata terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Bali.
5.	Ni Putu Sucitrawati Sudarsana Arka (2013)	Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Bali.	Variabel Dependen : Pengangguran Variabel Independen : Inflasi, Investasi dan Tingkat Upah.	Analisis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.	Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Bali pada tahun 1998-2011. Investasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Bali pada tahun 1998-2011. Serta tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat

					pengangguran di Bali tahun 1998-2011.
6.	Tengko Sarimuda RB, Soekarnoto (2014)	Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011.	Variabel Dependen : Pengangguran Variabel Independen : PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi.	Analisis data menggunakan regresi data panel.	PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Ter di kabupaten/kota pr. Jawa Timur tahun 2007-2011.
7.	Nuvi Wikhdatus Sa'adah, Putu Sardha Ardyan(2016).	Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran di	Variabel Dependen : Pengangguran Variabel Independen: Upah Minimum Pekerja dan Jumlah Penduduk Miskin.	Analisis data menggunakan regresi linier berganda.	Variabel independen Upah Minimum Pekerja (UMP) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran pada taraf 5%, sedangkan dapat dilihat dimana jumlah

		Surabaya.			penduduk miskin memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.
--	--	-----------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------



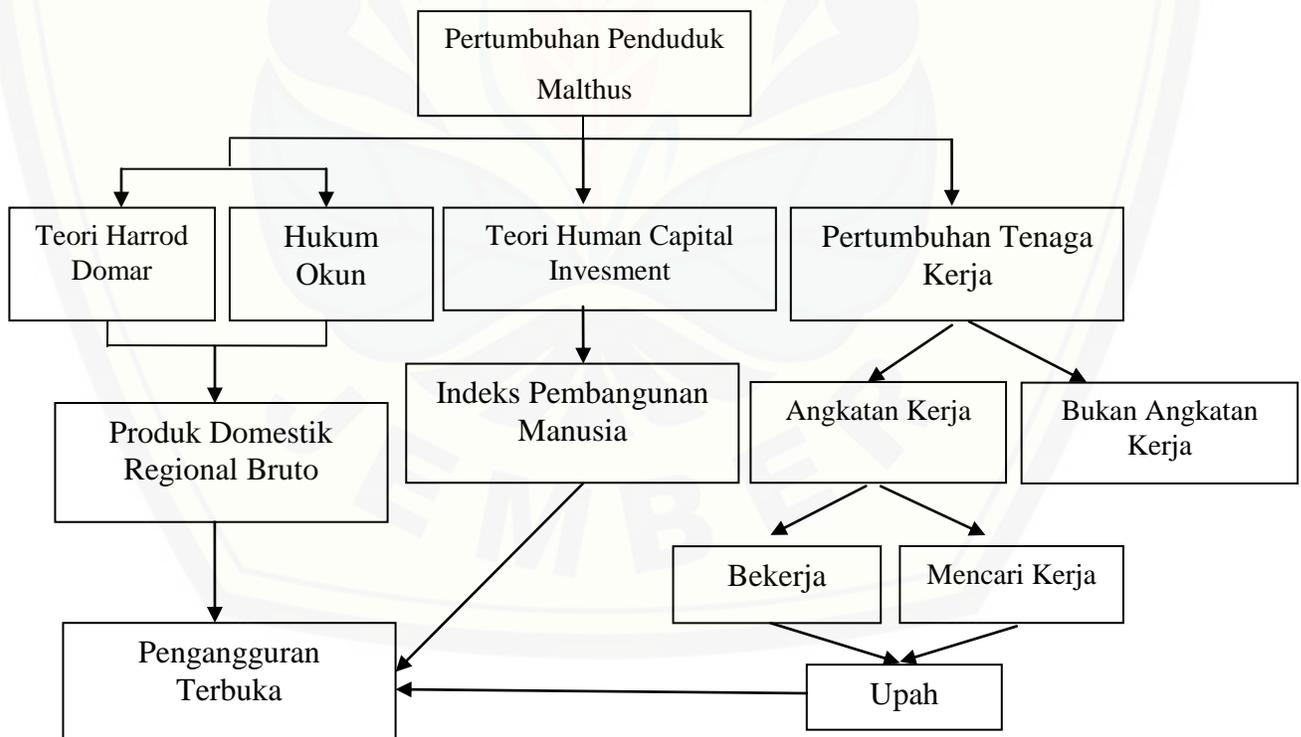
Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode data panel dimana metode tersebut merupakan gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*. Persamaan selanjutnya yaitu pada penelitian sebelumnya mayoritas menggunakan variabel Upah Minimum. Sedangkan untuk perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel bebas yang digunakan dimana pada penelitian terdahulu banyak yang menggunakan variabel bebas inflasi dan investasi. Kemudian pada penelitian terdahulu penggunaan variabel bebas mengenai kualitas manusia ini menggunakan tingkat pendidikan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel IPM pada penelitian sebelumnya menggunakan IPM dengan metode penghitungan lama dengan agregasi rata – rata Aritmatik sedangkan pada penelitian ini IPM yang digunakan menggunakan metode penghitungan baru dengan agregasi rata – rata Geometrik.

Adanya metode penghitungan baru dalam IPM menjadikan penelitian ini memiliki keunggulan pada variabel IPM lebih akurat penghitungannya, karena pada metode lama indikator pendidikan diproyeksikan dengan angka melek huruf dalam penghitungan metode baru indikator pendidikan diproyeksikan dengan harapan lama sekolah. Dengan sistem penghitungan tersebut didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Di Indonesia terdapat 34 provinsi namun dalam penelitian ini membahas 33 provinsi sehingga tidak semua provinsi ikut di teliti.

2.9 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan penduduk menjadikan suatu acuan yang digunakan pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi yang dimana pembangunan ekonomi tersebut disertai dengan pemerataan pendapatab bagi penduduk suatu Negara. Teori Malthus membahas tentang pertumbuhan tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, angkatan kerja dibagi menjadi dua yaitu bekerja dan mencari kerja. Seseorang yang bekerja atau yang mencari kerja secara tidak langsung berkaitan dengan upah. Menurut teori neoklasik upah dapat

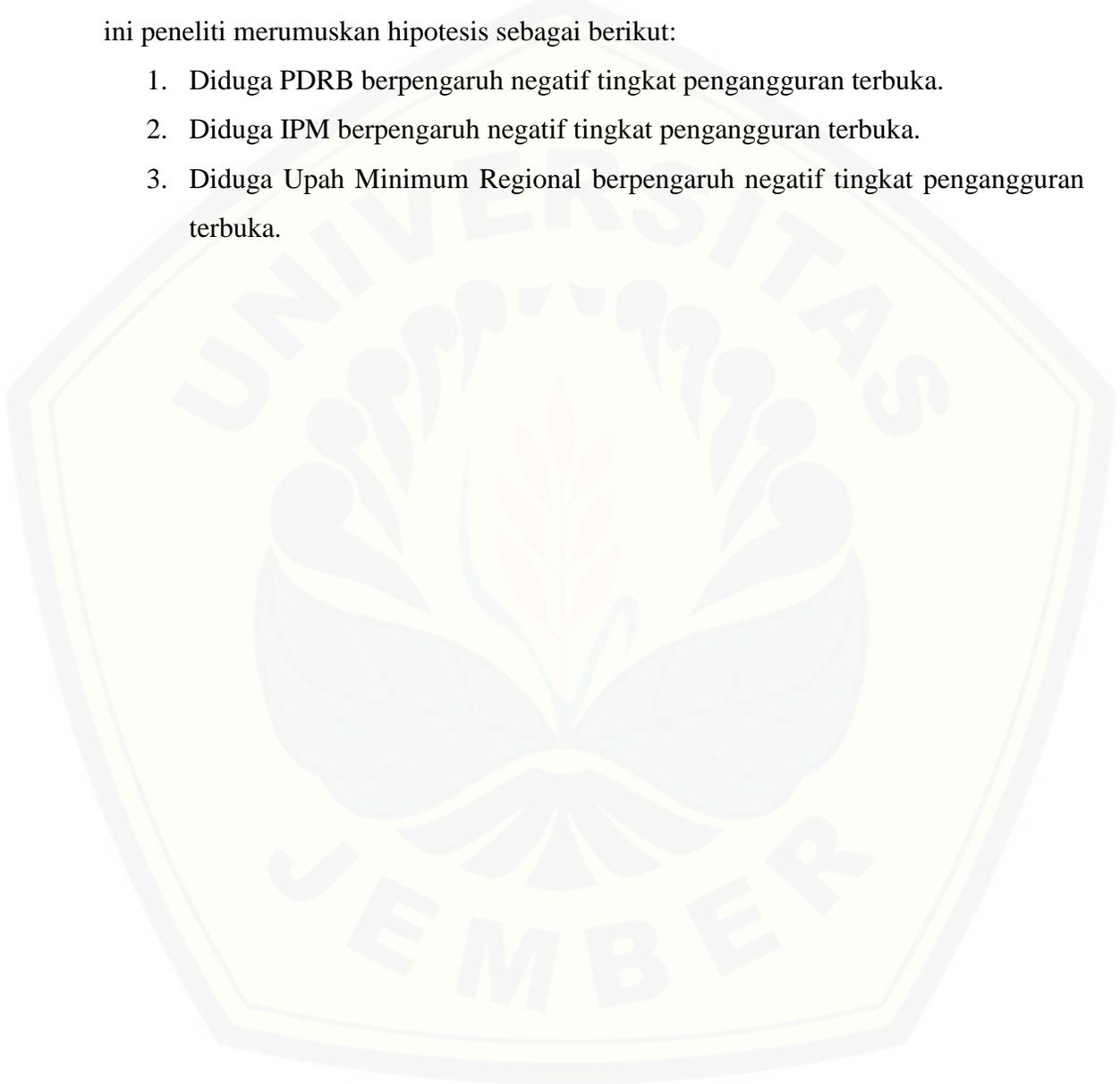
berpengaruh terhadap pengangguran. Hal tersebut didukung adanya kurva pasar tenaga kerja yang menunjukkan hubungan antara penawaran ataupun permintaan tenaga kerja dengan upah. Teori Human Capital menerangkan tentang kualitas manusia dimana dalam penelitian ini kualitas manusia dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). Kemudian terdapat teori Harrod Domar yang membahas tentang keterkaitan antara PDRB dengan pengangguran. Kemudian variabel tersebut dibedakan menjadi dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM) dan Upah Minimum Regional (UMR) sedangkan untuk variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka. Variabel- variabel tersebut akan diukur dengan alat regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen.



2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau simpulan yang diambil berdasarkan teori dalam kajian pustaka. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga PDRB berpengaruh negatif tingkat pengangguran terbuka.
2. Diduga IPM berpengaruh negatif tingkat pengangguran terbuka.
3. Diduga Upah Minimum Regional berpengaruh negatif tingkat pengangguran terbuka.



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang lebih menitik beratkan pada teori, mengukur variabel dengan menggunakan angka dan menganalisis data sesuai dengan prosedur statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2011-2015 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 33 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Dimana penggunaan 33 provinsi ini digunakan karena Provinsi Kalimantan Utara provinsi tidak mempunyai data yang lengkap dan merupakan provinsi baru yang ada di Indonesia. 33 data mewakili provinsi di Indonesia menghasilkan 165 observasi. Data sekunder yaitu data yang pengumpulannya tidak diusahakan sendiri oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik, dokumen – dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Periode data yang digunakan adalah data tahun 2011-2015 untuk masing – masing Provinsi di Indonesia. Data yang diperlukan adalah:

1. Data persentase penduduk pengangguran terbuka untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015.
2. Data laju Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015.
3. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015.
4. Data Upah Minimum Regional untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015.

Adapun sumber data yang diperoleh yaitu :

1. Data persentase penduduk pengangguran terbuka untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Data laju Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Data Upah Minimum Regional untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan *construct* atau konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia 2011-2015.

2. Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah PDRB, IPM, dan Upah Minimum Regional tahun 2011-2015.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak dibutuhkan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011 – 2015. Sebagai pendukung, digunakan buku

referensi, jurnal, surat kabar, serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan masalah pengangguran di Indonesia.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Metode Analisis Data Panel

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 9. Data Panel merupakan gabungan dari data individu (*cross-section*) dan data runtut waktu (*time series*). Dalam data panel suatu data terdiri atas observasi individu disurvey sepanjang periode waktu tertentu. Oleh karena itu model data panel memiliki kemampuan untuk menjelaskan bagaimana suatu individu berperilaku berbeda disbanding dengan individu lainnya dan juga sekaligus bisa mengetahui bagaimana perbedaan dari pola perubahan antar-waktu (Nury Effendi, Maman Setiawan; 2013) . Secara umum, penggunaan data panel mampu memberikan banyak keunggulan, antara lain:

1. Memiliki kemampuan dalam memodelkan heterogenitas antara individu atau antar-waktu dari perilaku variabel yang diteliti baik variasi didalam atau diantaranya (*within*) maupun variasi antara individu atau waktu (*between*).
2. Memiliki jumlah observasi data yang lebih besar ($N \times T$) jika dibandingkan dengan model yang hanya menggunakan data *cross-section* atau *time series* saja. Jumlah data ini bisa sangat berguna dalam mengatasi masalah variabilitas data yang diperlukan. Jumlah observasi data yang lebih besar juga bisa mengurangi permasalahan multikolinieritas yang bisa muncul jika terdapat lebih dari 1 variabel independen.
3. Analisis data panel dapat memberikan analisis yang luas dan komprehensif terhadap permasalahan yang ada.

Dalam analisis model panel data dikenal tiga macam, yaitu:

1. Regresi Pooling

Secara umum bentuk model linear yang digunakan untuk memodelkan data panel adalah :

$$y_{it} = x_{it}\beta_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana :

y_{it} ; adalah observasi dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t

x_{it} ; adalah vector k- variabel-variabel independen/input/regresor dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu tertentu

ε_{it} ; adalah komponen erroe yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan variansi homogen dalam waktu (homokedastik) serta independen dengan x_{it} untuk model data panel sering diasumsikan $\beta_{it} = \beta$, yakni pengaruh dari perubahan dalam X diasumsikan bersifat konstan dalam waktu dan dikategori *cross-section*.

2. Model *fixed effect*

Merupakan model dimana intersep dari model bervariasi berdasarkan individu dalam sampel. Analisis *fixed effect* bisa dilakukan dengan 2 cara : yaitu *least square dummy variable* (LSDV) dan *within transformation*.

3. *Random effect*.

Dengan menggunakan *fixed effect* dapat melihat karakteristik yang bersifat konstan dalam waktu atau konstan diantara individu. Model ini diambil dari faktor kesalahan (*error term*) yang acak yang diasumsikan tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika kesalahan mempunyai masalah autokorelasi maka teknik yang diperlukan yaitu dengan mengestimasi persamaan dengan mengeksplorasi struktur matriks kovarians kesalahannya (*generalized Least-square- GLS*).

3.4.2 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect* digunakan signifikansi Chow. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Model Common Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika Chow Statistif (*F- statistic*) > F tabel, maka H₀ ditolak dan lebih menggunakan FEM (*fixed effect method*).
2. Jika Chow Statistif (*F- statistic*) < F tabel, maka H₁ ditolak dan lebih menggunakan CEM (*common effect method*).

3.4.3 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara *fixed effects* dengan *random effects* digunakan signifikansi Hausman. Uji signifikansi Hausman menggunakan uji hipotesis berbentuk H₀ : E(C_i | X) = E(u) = 0, atau adanya efek acak di dalam model. Jika H₀ ditolak maka menggunakan model *fixed effect*. Dalam melakukan uji Hausman diperlukan asumsi banyaknya kategori *cross-section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen. Pengujian hipotesanya adalah sebagai berikut:

H₀ : Model Random Effect

H₁ : Model Fixed Effect

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika *Chi-Square statistic* > *Chi-Square table*, maka H₀ ditolak dan lebih menggunakan FEM (*fixed effect methode*)
2. Jika *Chi-Square statistic* < *Chi-Square table*, maka H₀ diterima dan lebih menggunakan REM (*random effect methode*).

3.4.4 Estimasi Model

Penelitian mengenai pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pengangguran (PG) menggunakan data *time series* selama lima tahun yang mewakili data tahunan dari 2011-2015 dan data *cross section* sebanyak 33 data mewakili provinsi di Indonesia yang menghasilkan 150 observasi.

Menurut Gujarati (2003) bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan error term, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi, yaitu:

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.
- c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu
- d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini pengaruh variabel PDRB, IPM dan Upah Minimum (UMP) terhadap Pengangguran (PG) digunakan asumsi *FEM* dikarenakan N besar dan T kecil selaintu bahwa unit *cross section* yang dipilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka harus menggunakan *fixed effect*. Asumsi *FEM* yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi *FEM* yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui pengangguran di Indonesia, yaitu :

$$PG = f(PDRB, IPM, UMR)$$

$$PG_{it} = b_0 + b_1 PDRB_{it} + b_2 IPM_{it} + b_3 UMP + U_{it}$$

Dimana :

PG	: tingkat pengangguran dalam persen
PDRB	: laju PDRB harga konstan tahun 2010 dalam persen
IPM	: indeks pembangunan manusia dalam persen
UMP	: upah minimum per provinsi dalam rupiah
<i>i</i>	: <i>cross section</i>
<i>t</i>	: <i>time series</i>
<i>b</i> ₀	: konstanta
<i>b</i> ₁ , <i>b</i> ₂ , <i>b</i> ₃ , <i>b</i> ₄	: koefisien

U : error

Menurut Imam Ghozali (dikutip dalam Ravi Dwi Wijayanto, 2010) Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari adanya heterokedastisitas
- b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas.
- c. Mendekatkan skala data

3.5 Pengujian Kriteria Statistik

Menurut Gujarati (1995) bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi secara bersama – sama (uji F), pengujian koefisien regresi parsial (uji t), dan pengujian koefisien determinasi (uji- R^2).

3.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan atau bersama-sama. Uji F digunakan Hipotesis sebagai berikut (Nairobi,1995):

1. $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ (tidak ada pengaruh)
2. $H_a : b_i \neq 0$ (ada pengaruh) untuk $i = 1 \dots k$

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F-tabel. Apabila F-hitung dinyatakan $>$ F-tabel, maka H_0 ditolak dan dapat diartikan bahwa variabel

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus:

$$F_{hit} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/n-k}$$

dimana:

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

3.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1. $H_0 : b_1 = 0$ ($i = 1, 2, 3$) tidak ada pengaruh antara variabel PDRB, IPM dan Upah Minimum dengan Pengangguran.
2. $H_1 : b_1 \neq 0$ ($i = 1, 2, 3$) ada pengaruh positif antara variabel PDRB, IPM dan Upah Minimum dengan Pengangguran.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{b_i - b_i^*}{SE(b_i)}$$

dimana:

b_i : parameter yang diestimasi

b_i^* : nilai hipotesis dari b_i ($H_0 : b_i = b_i^*$)

$SE(b_i)$: simpangan baku b_i

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika t -hitung $>$ t -tabel maka H_0 ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

- b) Jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.5.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien R^2 menjelaskan sejauh mana garis regresi fit dengan data. R^2 ini mengukur proporsi dari varians y atau $v(y_i)$ yang dapat dijelaskan oleh model. Beberapa karakteristik dari R^2 yaitu:

1. Nilai koefisien R^2 bernilai 0 hingga 1.
2. Koefisien R^2 tidak akan bernilai 0 atau 1 jika spesifikasi model regresinya tanpa intersep. Hal ini dikarenakan intersep dapat menghasilkan nilai rata-rata residual tidak sama dengan nol.
3. Koefisien R^2 akan bertambah seiring dengan penambahan variabel independen kedalam model.

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Kenormalan dari variabel pengganggu dapat diamati dengan melakukan uji Jarque-Berra LM (gujarati, 1995:143). Seperti yang diketahui diasumsikan bahwa variabel pengganggu memiliki distribusi normal, sehingga uji t dan uji F dapat dilakukan. Namun apabila asumsi normalitas tidak dapat terpenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan uji statistik t dan F , dan hanya dapat dilakukan dengan konteks asumsi asimtotik. Meskipun sebenarnya ada *Central Limit Theorem* (wanacot-wanacot, 1989:201), namun kenormalan harus tetap diuji keabsahannya menggunakan uji t dan F .

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Dengan kata lain adanya gejala multikolinearitas menunjukkan terdapatnya hubungan sempurna antara semua atau beberapa variabel penjelas (variabel bebas).

Multikolinieritas diduga terjadi jika nilai R^2 tinggi dan nilai t semua variabel penjelas tidak signifikan, serta nilai F tinggi (Wardhono, 2004).

Cara mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan berbagai hal yaitu:

- a. korelasi sederhana diantara variabel independen dimana jika korelasi antar variabel independen nilainya diatas 0,8 maka dicugai terdapat masalah multikolinieritas.
- b. Menggunakan regresi tambahan antara variabel independen k dengan variabel independen-1 sisanya. Jika koefisien determinasi yang dihasilkan lebih besar dari 0,65 maka terdapat masalah multikolinieritas.

Cara mengatasi multikolinieritas dengan cara yaitu :

- a. Menambah observasi data
- b. Mengeluarkan satu atau beberapa variabel penyebab masalah multikolinieritas.
- c. Menggunakan bentuk nonlinear dari variabel independen
- d. Melakukan pengecekan apakah ukuran variabel yang digunakan sudah benar mengukur yang seharusnya diukur.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Heteroskedastisitas terjadi pada model data cross-section karena data tersebut terdiri atas berbagai unit yang memiliki perbedaan dalam ukuran. Untuk mengetahui pengaruh heteroskedastisitas ini pada model regresi digunakan metode OLS.

3.7 Definisi Operasional

Pada subbab ini langkah selanjutnya adalah mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (*dependent variabel*) dan tiga variabel bebas

(*independent variabel*). Adapun yang termasuk variabel terikat adalah pengangguran terbuka dan variabel bebas adalah PDRB, IPM, dan Upah Minimum.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengangguran Terbuka

Menurut Sakernas pada tahun 2001 definisi pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang sedang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum memulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja. Pengangguran pada definisi/konsep tersebut biasanya disebut Pengangguran Terbuka (*open unemployment*).

Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Pengangguran terbuka di Indonesia menurut provinsi tahun 2011-2015 (dalam satuan persen).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB harga konstan di Indonesia pada tahun 2011-2015 (dalam satuan milyar rupiah).

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Data yang digunakan untuk melihat IPM adalah IPM di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2011-2015 (dalam satuan persen).

4. Upah Minimum

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) Upah adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik berupa uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca catatan perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 tentang upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Data yang digunakan untuk melihat Upah Minimum di Indonesia adalah Upah Minimum di provinsi di Indonesia tahun 2011-2015 (dalam satuan rupiah).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum terhadap pengangguran terbuka di 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi pengangguran. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan PDRB yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia selalu diikuti oleh penurunan Pengangguran Terbuka di 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2015.
2. Variabel IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi pengangguran. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan IPM yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia selalu diikuti oleh penurunan Pengangguran Terbuka di 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2015.
3. Variabel Upah Minimum mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan Upah Minimum di 33 provinsi di Indonesia selalu diikuti oleh peningkatan Pengangguran Terbuka di 33 provinsi di Indonesia tahun 2011-2015.

5.2 Saran

1. PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sehingga diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi mampu meningkatkan PDRB dengan cara membuka peluang investasi di Negara/daerah untuk asing dan domestic. Semakin besar nilai investasi maka semakin besar pulai nilai PDRB sehingga dapat menurunkan pengangguran terbuka.
2. IPM berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sehingga diharapkan bagi pemerintah pusat maupun provinsi untuk terus meningkatkan kualitas manusia dengan cara meningkatkan pembangunan pada bagian kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Semakin baiknya pembangunan pada bagian kesehatan, pendidikan, dan perekonomian maka IPM semakin tinggi sehingga dapat menurunkan pengangguran terbuka.
3. Upah Minimum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran, sehingga diharapkan upah minimum harus ditingkatkan agar menurunkan pengangguran dengan cara meningkatkan output bagi perusahaan. Dengan meningkatkan output perusahaan tersebut maka akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Meningkatnya keuntungan tersebut berimbas pada pajak yang diterima oleh pemerintah, dengan begitu pendapatan asli daerah akan meningkat sehingga upah minimum tersebut akan bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarullah, Irwan. 2008. Analisis Faktor – Faktor Penyebab Persistensi Pengangguran di Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Arka, Sudarsana dan Sucitrawati, Ni Putu. 2013. Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Bali. Universitas Udayana. Bali.
- Atmanti, Dwi Hastarini. 2005. Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan* (online), Vol. 2 No. 1, (journal.uny.ac.id) diakses 18 Februari 2013
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto menurut Provinsi 2017*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2015*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Laporan Perekonomian Indonesia 2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Indonesia 2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “EkaTaruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Universitas Udayana. Bali
- Burhanudin, Muhamad. 2015. Pengaruh PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran di Banten periode 2008-2013.
- Dajan, Anto. 2001. Pengantar Metode Statistik Jilid II. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Effendi, Nury dan Setiawan, Maman. 2013. *Ekonometrika: Pendekatan Teoridan Terapan*. Bandung. Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.

- Hartanto, Trianggono Budi dan Masjkuri, Siti Umajah. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.
- Karmini, Ni Luh dan Wijayanti, Ni Nyoman Setya Ari. 2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali. Universitas Udayana. Bali.
- Latumaerissa, Julius R. 2015. Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mankiw, Gregory N. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Ma'ruf Ahmad dan Wihastuti Latri. 2008. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Posisinya. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Marhaeni, A A I N dan Sitrait, Novlin. 2013. Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. Universitas Udayana. Bali.
- Marzuki. 2005. Metodologi Riset. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Pambudi, Eko Wicaksono. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prasetya, Dionysius Dimas Kevin. 2015. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Riil dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Riil Terhadap Kesempatan Kerja Di Jawa Tengah 2009-2013. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Qadrunnada, Lutfi. Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Terhadap Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

- Rosadi, Dedi. 2011. *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Sa'adah, Nuvi Wikhdatus dan Ardyan, Putu Sardha. 2016. *Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Di Surabaya*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Surabaya.
- Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sari, Anggun Kembar. 2013. *Analisis Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatra Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Padang, Sumatra Barat.
- Sarimuda, Tengko RB dan Soekarnoto. 2014. *Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sisputro, Akbar. 2013. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan Beban/Tanggungannya Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Magelang Periode Tahun 1990-2010*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: FEUI dengan Bima Grafika.
- Sunan, Muammil dan Senuk, Abdurrahman. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Syahril. 2013. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat*. Universitas Teuku Umar. Aceh.
- Todaro M,P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed). Erlangga. Jakarta.

- Todaro, M.P and Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Haris Munandar (Alih Bahasa), Jilid 1, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro M,P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Tri Basuki, Agus. 2014. *Regresi Model PAM, ECM dan Data Panel dengan Eviews 7*. Katalog Dalam Terbitan. Yogyakarta.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember
- Wijayanto, Ravi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yuli Arifin, Mochammad. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006 – 2013*. Jember. Universitas Jember.

Website:

<https://zonadamai.com/2017/11/17/batas-wilayah-indonesia-secara-astronomis-dan-geografis/>

Lampiran A

Data PDRB, IPM, Upah Minimum di 33 Provinsi di Indonesia 2011-2015

Provinsi	Tahun	Pengangguran	PDRB	IPM	upah
Aceh	2011	8.81	104874.21	67.45	1350000
Aceh	2012	8.5	108914.90	67.81	1400000
Aceh	2013	9.23	111755.83	68.30	1550000
Aceh	2014	7.885	113490.36	68.81	1750000
Aceh	2015	8.83	112661.04	69.45	1900000
Sumatera Utara	2011	7.825	353147.59	67.34	1035500
Sumatera Utara	2012	6.355	375924.14	67.74	1200000
Sumatera Utara	2013	6.27	398727.14	68.36	1375000
Sumatera Utara	2014	6.09	419573.31	68.87	1505850
Sumatera Utara	2015	6.55	440955.85	69.51	1625000
Sumatera Barat	2011	7.765	111679.49	67.81	1055000
Sumatera Barat	2012	6.57	118724.42	68.36	1150000
Sumatera Barat	2013	6.705	125940.63	68.91	1350000
Sumatera Barat	2014	6.41	133340.84	69.36	1490000
Sumatera Barat	2015	6.44	140704.88	69.98	1615000
Riau	2011	6.8	410215.84	68.90	1120000
Riau	2012	4.83	425626.00	69.15	1238000
Riau	2013	4.835	436187.51	69.91	1400000
Riau	2014	5.775	447986.78	70.33	1700000
Riau	2015	7.275	448991.96	70.84	1878000
Jambi	2011	4.305	97740.87	66.14	1028000
Jambi	2012	3.445	104615.08	66.94	1142500
Jambi	2013	3.825	111766.13	67.76	1300000
Jambi	2014	3.79	119991.44	68.24	1502300
Jambi	2015	3.535	125036.40	68.89	1710000
Sumatera Selatan	2011	6.445	206360.70	65.12	1048440
Sumatera Selatan	2012	5.63	220459.20	65.79	1195220
Sumatera Selatan	2013	5.125	232175.05	66.16	1630000
Sumatera Selatan	2014	4.4	243297.77	66.75	1825000
Sumatera Selatan	2015	5.55	254044.88	67.46	1974346
Bengkulu	2011	3.46	30295.05	65.96	815000
Bengkulu	2012	2.9	32363.04	66.61	930000
Bengkulu	2013	3.355	34326.37	67.50	1200000

Bengkulu	2014	2.545	36207.15	68.06	1350000
Bengkulu	2015	4.06	38066.01	68.59	1500000
Lampung	2011	5.95	160437.50	64.20	855000
Lampung	2012	5.205	170769.21	64.87	975000
Lampung	2013	5.38	180620.01	65.73	1150000
Lampung	2014	4.935	189797.49	66.42	1399037
Lampung	2015	4.29	199536.10	66.95	1581000
Kepulauan Bangka Belitung	2011	3.585	38013.99	66.59	1024000
Kepulauan Bangka Belitung	2012	3.125	40104.91	67.21	1110000
Kepulauan Bangka Belitung	2013	3.435	42190.86	67.92	1265000
Kepulauan Bangka Belitung	2014	3.905	44159.44	68.27	1640000
Kepulauan Bangka Belitung	2015	4.82	45961.46	69.05	2100000
Kepulauan Riau	2011	6.29	118961.42	71.61	975000
Kepulauan Riau	2012	5.395	128034.97	72.36	1015000
Kepulauan Riau	2013	5.84	137263.85	73.02	1365087
Kepulauan Riau	2014	5.975	146325.23	73.40	1665000
Kepulauan Riau	2015	7.625	155112.88	73.75	1954000
Jawa Barat	2011	9.985	965622.06	66.67	732000
Jawa Barat	2012	9.46	1028409.74	67.32	780000
Jawa Barat	2013	9.02	1093543.55	68.25	850000
Jawa Barat	2014	8.555	1149216.06	68.80	1000000
Jawa Barat	2015	8.56	1207083.41	69.50	1000000
Jawa Tengah	2011	6.625	656268.13	66.64	675000
Jawa Tengah	2012	5.755	691343.12	67.21	765000
Jawa Tengah	2013	5.77	726655.12	68.02	830000
Jawa Tengah	2014	5.565	764959.15	68.78	910000
Jawa Tengah	2015	5.15	806775.36	69.49	910000
DI Yogyakarta	2011	4.965	68049.87	75.93	808000
DI Yogyakarta	2012	3.94	71702.45	76.15	892660
DI Yogyakarta	2013	3.495	75627.45	76.44	947114
DI Yogyakarta	2014	2.745	79536.08	76.81	988500
DI Yogyakarta	2015	4.07	83474.44	77.59	988500
Jawa Timur	2011	4.81	1054401.77	66.06	705000

Jawa Timur	2012	4.135	1124464.64	66.74	745000
Jawa Timur	2013	4.135	1192789.80	67.55	866250
Jawa Timur	2014	4.105	1262684.50	68.14	1000000
Jawa Timur	2015	4.39	1331394.99	68.95	1000000
Banten	2011	13.68	290545.84	68.22	1000000
Banten	2012	10.31	310385.59	68.92	1042000
Banten	2013	9.655	331099.11	69.47	1170000
Banten	2014	9.47	349351.23	69.89	1325000
Banten	2015	9.065	368216.55	70.27	1600000
Nusa Tenggara Barat	2011	5.355	67379.14	62.14	955300
Nusa Tenggara Barat	2012	5.23	66340.81	62.98	955300
Nusa Tenggara Barat	2013	5.29	69766.71	63.76	955300
Nusa Tenggara Barat	2014	5.525	73372.96	64.31	955300
Nusa Tenggara Barat	2015	5.335	89344.58	65.19	955300
Nusa Tenggara Timur	2011	2.935	46334.13	60.24	1000000
Nusa Tenggara Timur	2012	2.785	48863.19	60.81	1000000
Nusa Tenggara Timur	2013	2.685	51505.19	61.68	1000000
Nusa Tenggara Timur	2014	2.615	54107.97	62.26	1000000
Nusa Tenggara Timur	2015	3.475	56831.92	62.67	1000000
Kalimantan Barat	2011	4.915	90797.59	62.35	1042000
Kalimantan Barat	2012	3.48	96161.93	63.41	1042000
Kalimantan Barat	2013	3.56	101980.34	64.30	1042000
Kalimantan Barat	2014	3.285	107114.96	64.89	1042000
Kalimantan Barat	2015	4.965	112324.86	65.59	1042000
Kalimantan Tengah	2011	3.685	60492.93	66.38	1170000
Kalimantan Tengah	2012	2.935	64649.17	66.66	1170000
Kalimantan Tengah	2013	2.405	69410.99	67.41	1170000
Kalimantan Tengah	2014	2.975	73724.52	67.77	1170000

Kalimantan Tengah	2015	3.84	78890.97	68.53	1170000
Kalimantan Timur	2011	11.165	445264.42	72.02	1600000
Kalimantan Timur	2012	9.25	469646.25	72.62	1600000
Kalimantan Timur	2013	8.445	438532.91	73.21	1600000
Kalimantan Timur	2014	8.135	446029.05	73.82	1600000
Kalimantan Timur	2015	7.335	440647.70	74.17	1600000
Sulawesi Utara	2011	9.92	54910.90	68.31	1784000
Sulawesi Utara	2012	8.265	58677.59	69.04	1784000
Sulawesi Utara	2013	7.145	62422.50	69.49	1784000
Sulawesi Utara	2014	7.405	66360.76	69.96	1784000
Sulawesi Utara	2015	8.86	70425.14	70.39	1784000
Sulawesi Tengah	2011	5.545	56833.83	64.27	827500
Sulawesi Tengah	2012	3.85	62249.53	65	885000
Sulawesi Tengah	2013	3.43	68219.32	65.79	995000
Sulawesi Tengah	2014	3.3	71677.53	66.43	1250000
Sulawesi Tengah	2015	3.545	82803.20	66.76	1500000
Sulawesi Selatan	2011	7.51	185708.47	66.65	1100000
Sulawesi Selatan	2012	6.285	202184.59	67.26	1200000
Sulawesi Selatan	2013	5.49	217589.13	67.92	1440000
Sulawesi Selatan	2014	5.435	233988.05	68.49	1800000
Sulawesi Selatan	2015	5.88	250758.28	69.15	2000000
Sulawesi Tenggara	2011	4.57	53546.69	66.52	930000
Sulawesi Tenggara	2012	3.67	59785.40	67.07	1032300
Sulawesi Tenggara	2013	3.905	64268.71	67.55	1125207
Sulawesi Tenggara	2014	3.28	68291.78	68.07	1400000
Sulawesi Tenggara	2015	4.585	72991.33	68.75	1652000
Gorontalo	2011	5.845	16669.09	63.48	762500
Gorontalo	2012	4.695	17987.07	64.16	837500
Gorontalo	2013	4.33	19367.57	64.70	1175000
Gorontalo	2014	3.31	20775.80	65.17	1325000
Gorontalo	2015	3.855	22068.59	65.86	1600000
Sulawesi Barat	2011	3.06	19027.50	60.63	1006000
Sulawesi Barat	2012	2.13	20786.89	61.01	1127000
Sulawesi Barat	2013	2.185	22227.39	61.53	1165000
Sulawesi Barat	2014	1.84	24195.65	62.24	1400000
Sulawesi Barat	2015	2.58	25983.65	62.96	1655500
Maluku	2011	9.495	19597.39	64.75	900000
Maluku	2012	7.65	21000.08	65.43	975000

Maluku	2013	8.44	22100.94	66.09	1275000
Maluku	2014	8.55	23567.73	66.74	1415000
Maluku	2015	8.325	24859.06	67.05	1650000
Maluku Utara	2011	5.57	16002.45	63.19	889350
Maluku Utara	2012	5.16	17120.07	63.93	960498
Maluku Utara	2013	4.65	18208.74	64.78	1200622
Maluku Utara	2014	5.47	19208.76	65.18	1440746
Maluku Utara	2015	5.805	20381.03	65.91	1577617
Papua Barat	2011	6.775	42867.19	59.90	1410000
Papua Barat	2012	5.995	44423.34	60.30	1450000
Papua Barat	2013	4.38	47694.23	60.91	1720000
Papua Barat	2014	4.36	50259.91	61.28	1870000
Papua Barat	2015	6.345	52346.49	61.73	2015000
Papua	2011	4.43	106066.72	55.01	1403000
Papua	2012	3.37	107890.94	55.55	1585000
Papua	2013	3.03	117118.82	56.25	1710000
Papua	2014	3.46	121391.23	56.75	2040000
Papua	2015	3.855	130459.91	57.25	2193000
DKI Jakarta	2011	11.275	1290000	76.98	1290000
DKI Jakarta	2012	10.135	1529150	77.53	1529150
DKI Jakarta	2013	9.135	2200000	78.08	2200000
DKI Jakarta	2014	9.155	2441000	78.39	2441000
DKI Jakarta	2015	7.795	2700000	78.99	2700000
Bali	2011	2.975	99991.63	70.87	890000
Bali	2012	2.165	106951.46	71.62	967500
Bali	2013	1.88	114103.58	72.09	1181000
Bali	2014	1.635	121787.57	72.48	1542600
Bali	2015	1.68	129130.59	73.27	1621172
Kalimantan Selatan	2011	6.015	1325000	65.89	1325000
Kalimantan Selatan	2012	4.765	1325000	66.68	1325000
Kalimantan Selatan	2013	3.77	1325000	67.17	1325000
Kalimantan Selatan	2014	3.915	1325000	67.63	1325000
Kalimantan Selatan	2015	4.875	1325000	68.38	1325000

Lampiran B

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	37.568659	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	385.113543	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 04/26/18 Time: 16:55
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.185375	2.795537	-1.497163	0.1363
X1	1.08E-06	3.89E-07	2.764708	0.0064
X2	0.125916	0.042393	2.970178	0.0034
X3	6.77E-07	4.49E-07	1.508875	0.1333
R-squared	0.174029	Mean dependent var		5.508394
Adjusted R-squared	0.158638	S.D. dependent var		2.308491
S.E. of regression	2.117481	Akaike info criterion		4.362275
Sum squared resid	721.8801	Schwarz criterion		4.437571
Log likelihood	-355.8877	Hannan-Quinn criter.		4.392841
F-statistic	11.30736	Durbin-Watson stat		0.202136
Prob(F-statistic)	0.000001			

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	36.558578	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.000002	-0.000000	0.000000	0.0000
X2	-0.400312	-0.016132	0.007306	0.0000
X3	0.000001	-0.000001	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/26/18 Time: 16:55

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.36630	6.882725	4.702542	0.0000
X1	-2.14E-06	6.74E-07	-3.170898	0.0019
X2	-0.400312	0.107527	-3.722889	0.0003
X3	5.97E-07	4.05E-07	1.472702	0.1433

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.919959	Mean dependent var	5.508394
Adjusted R-squared	0.898243	S.D. dependent var	2.308491
S.E. of regression	0.736396	Akaike info criterion	2.416133
Sum squared resid	69.95398	Schwarz criterion	3.093794
Log likelihood	-163.3310	Hannan-Quinn criter.	2.691219
F-statistic	42.36215	Durbin-Watson stat	1.591964
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Regresi Data Panel Variabel PDRB, IPM, dan Upah Minimum Terhadap Variabel
Pengangguran Terbuka

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 04/26/18 Time: 16:56
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.36630	6.882725	4.702542	0.0000
X1	-2.14E-06	6.74E-07	-3.170898	0.0019
X2	-0.400312	0.107527	-3.722889	0.0003
X3	5.97E-07	4.05E-07	1.472702	0.1433

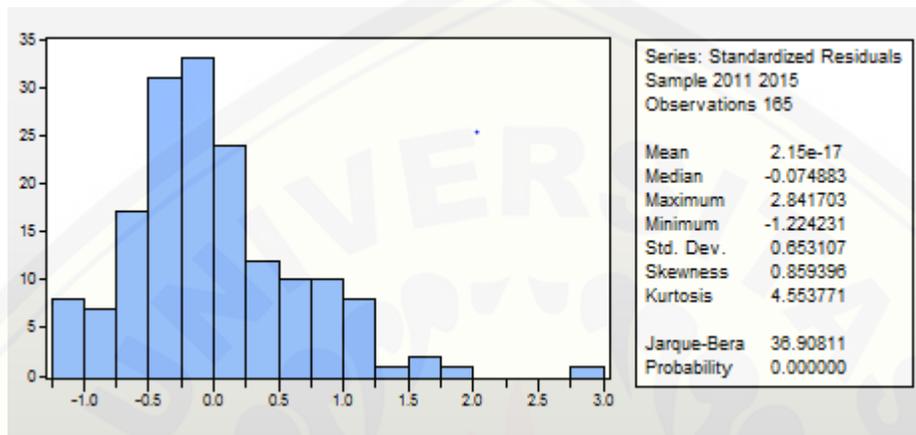
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.919959	Mean dependent var	5.508394
Adjusted R-squared	0.898243	S.D. dependent var	2.308491
S.E. of regression	0.736396	Akaike info criterion	2.416133
Sum squared resid	69.95398	Schwarz criterion	3.093794
Log likelihood	-163.3310	Hannan-Quinn criter.	2.691219
F-statistic	42.36215	Durbin-Watson stat	1.591964
Prob(F-statistic)	0.000000		

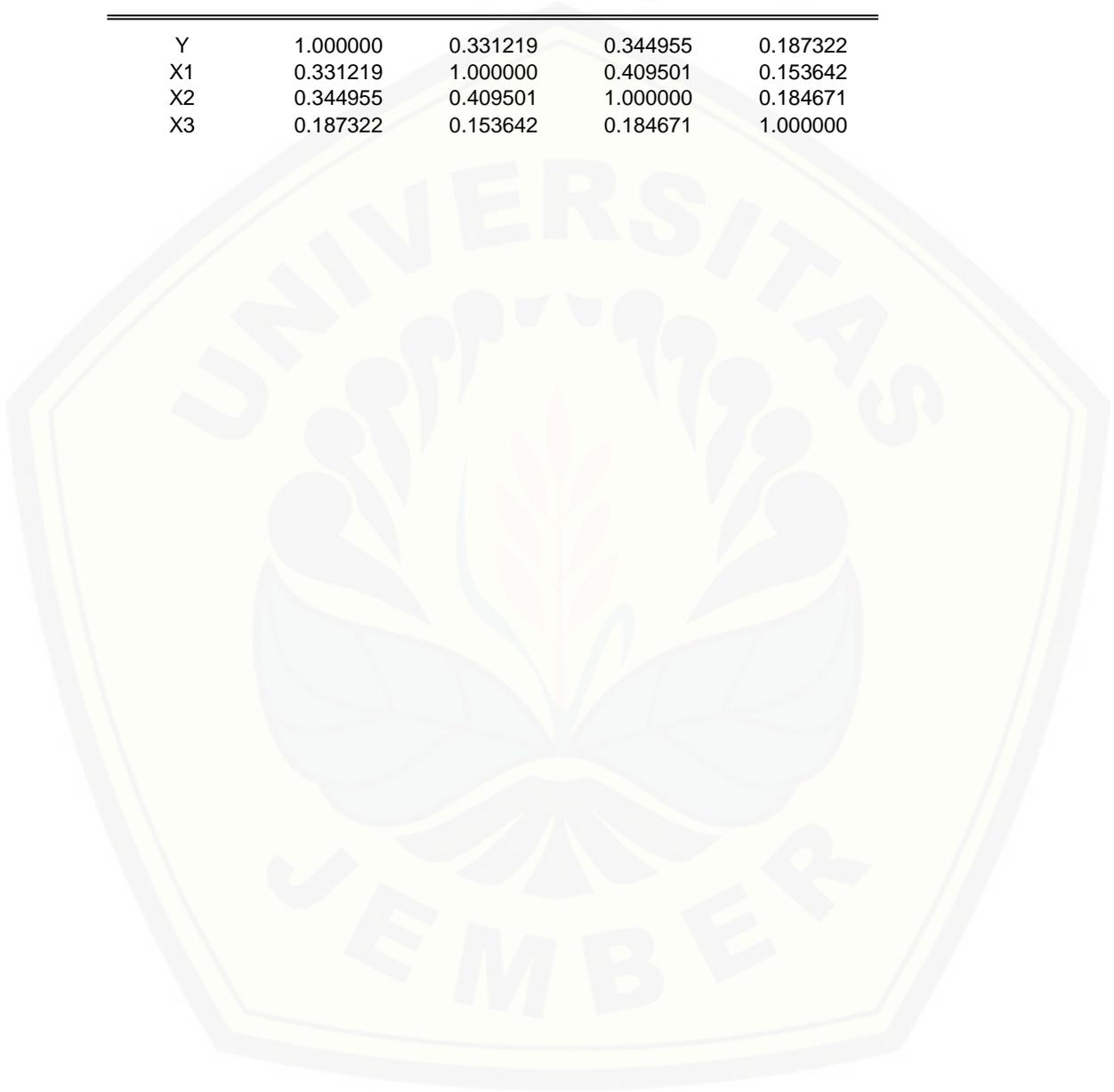
Lampiran C

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1.000000	0.331219	0.344955	0.187322
X1	0.331219	1.000000	0.409501	0.153642
X2	0.344955	0.409501	1.000000	0.184671
X3	0.187322	0.153642	0.184671	1.000000



Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/26/18 Time: 16:57
 Sample: 2011 2015
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.923486	3.753285	0.246047	0.8060
X1	-2.95E-08	3.67E-07	-0.080295	0.9361
X2	-0.006963	0.058637	-0.118748	0.9057
X3	4.02E-08	2.21E-07	0.181841	0.8560

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.286145	Mean dependent var	0.497344
Adjusted R-squared	0.092463	S.D. dependent var	0.421532
S.E. of regression	0.401571	Akaike info criterion	1.203366
Sum squared resid	20.80245	Schwarz criterion	1.881027
Log likelihood	-63.27770	Hannan-Quinn criter.	1.478452
F-statistic	1.477399	Durbin-Watson stat	2.450768
Prob(F-statistic)	0.060987		